

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 9 Majalengka 45411

Telp. (0233) 281167 Faks. (0233) 281167

Web : <https://bkad.majalengkakab.go.id>

Email : bkad.majalengka.21@gmail.com



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEUANGAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 9 Majalengka 45411

Telp. (0233) 281167; Faks. (0233) 281167

[https : //www.bkad.majalengkakab.go.id](https://www.bkad.majalengkakab.go.id)

e-mail : bkad@bkad.majalengka.go.id



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dapat diselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman penyusunan program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2024 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang memuat diantaranya memuat tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai.

Dalam mengemban amanat peraturan perundangan dimaksud dan sekaligus dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka berusaha menyusun Rencana Kerja Perubahan ini dengan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang selanjutnya dapat dipedomani oleh seluruh komponen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini dapat disusun berkat kerja sama seluruh komponen di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten



Majalengka. Kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan saran, pertimbangan, dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

Majalengka, 1 Agustus 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II 8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah..... 9

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 10

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 11

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....12

BAB IV PENUTUP.....13

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Atas dasar alur tersebut, Kami menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang menyajikan target kinerja tahun 2024 dalam upaya melaksanakan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, sekaligus merupakan komitmen untuk mewujudkan visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka yang “Profesional dan Akuntabel”.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2024 yang berfokus pada arah pelaksanaan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun hal-hal yang mendasari disusunnya Rencana Kerja Perubahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 adalah:

1. Adanya pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran sub kegiatan, dan target kinerja, serta manfaat dari kegiatan/sub kegiatan;
2. Percepatan pelaksanaan penyesuaian program/kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026;
3. Hasil Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten majalengka tahun 2012 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 70);
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 82 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 82);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten majalengka Tahun 2023 Nomor 30);



28. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 11);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai *guiden line* bagi seluruh komponen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dalam merencanakan, mengendalikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 bertujuan untuk tercapainya visi dan misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka yaitu “Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik dan Bersih” melalui berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Adapun tujuan dari Rencana Kerja Perubahan dimaksud untuk :

1. Pelaksanaan Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan;
3. Pedoman dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 361 ayat (3) dimana Rencana Kerja paling sedikit mencakup:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan hukum;
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika penulisan;

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN****BAB II**



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 telah direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 sesuai Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari 3 (Tiga) program dan 11 (Sebelas) kegiatan serta 51 (Lima Puluh Satu) Sub Kegiatan tersebar pada kelompok program dan kegiatan prioritas/non prioritas dan urusan dasar. Secara komprehensif sebagian program yang ada telah dapat diaplikasikan dan dilaksanakan realisasi Tahun 2024 Triwulan II adalah sebesar **48,13%** untuk keuangan dan fisik. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 disajikan dalam Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 sebagaimana terlampir:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tahun 2024, kiranya dapat dianalisa salah satunya dari hasil capaian target kinerja. Keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dalam mencapai beberapa target kinerja tahun 2024 yaitu:



1. Dukungan para pemangku kebijakan dan *stakeholder* lainnya yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja sesuai jadwal/*time schedule* yang telah direncanakan;
3. Ketepatan penyusunan rencana kerja sesuai target yang telah ditetapkan yang mengacu pada peraturan yang ada;
4. Ketersediaan anggaran yang memadai.

Sedangkan kegagalan yang terjadi pada sebagian kecil capaian target kinerja tahun 2024 dengan adanya kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat yang membagi DAU menjadi 2 (dua) penyaluran yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya serta turunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kembali melakukan Realokasi terhadap Belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilakukan revisi untuk pemenuhan capaian target pada Progra, Kegiatan dan sub kegiatan.

Alternatif solusi untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian target kinerja, maka perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala baik dalam bentuk evaluasi bulanan maupun triwulanan serta dengan mengajukan kembali penambahan anggaran untuk mencapai target kinerja. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka juga mengkoordinasikan perencanaan atau usulan-usulan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Adapun kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2024.

Disajikan dalam Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana terlampir:

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis



Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

a. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan utama pembangunan sistem informasi ini adalah untuk memudahkan penatausahaan keuangan daerah dari mulai penganggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Pembangunan Sistem ini diperlukan mengingat terjadinya perubahan basis dari basis kas ke basis akrual.

b. Tersusunnya APBD tepat waktu.

Penyusunan APBD baik mekanisme maupun jadwalnya sudah diatur dalam peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Penyusunan APBD juga melibatkan banyak pihak seperti : SKPD, TAPD, dan DPRD Kabupaten Majalengka.

c. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat

d. Perlunya peningkatan penatausahaan aset daerah

e. Perlunya penyusunan *database* aset daerah guna optimalisasi pemanfaatan asset daerah

f. Perlu adanya integrasi aplikasi keuangan dan aplikasi aset guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Perubahan tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan



Aset Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan rancangan awal RKPD dilakukan penyesuaian terhadap sasaran program dan kegiatan serta dana untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, secara keseluruhan dan hasil review ini menjadi dasar penyusunan rancangan awal RKPD.

Disajikan dalam Tabel T-C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebagaimana terlampir :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan awal Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Hasil dari telaahan terhadap usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024, namun tidak terdapat substansi yang terkait dengan program/kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenMajalengka.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan dengan difokuskan pada pendudukan terhadap 6 (enam) Prioritas Pembangunan Majalengka. Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui pelaksanaan Program Pembangunan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 maka diperoleh rumusan terdiri dari **3 (tiga) Program** dan **11 (sebelas) Kegiatan** dan **51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 dengan lokasi kegiatan berada di Kabupaten Majalengka dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp511.890.026.726,00 (Lima ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)** dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel terlampir.



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 disusun dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang terjadi pada kurun waktu sampai dengan triwulan II dan merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2024.

Dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 semua komponen di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebagai berikut:

1. Seluruh komponen di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi Seluruh Komponen di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.



3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka seluruh komponen di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bidang sesuai dengan pagu Perubahan tahun 2024.

Keberhasilan Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat diharapkan bersungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2024 dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

Majalengka, 1 Agustus 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Semester I Tahun 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(outcomes/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (a-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capai Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Target Renstra (%)
1	UNSTR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.179.028.960,00	7.772.359.629,00	95,03%	10.943.118.700,00	3.730.990.891,00	34,41%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				91.000.000,00	83.750.000,00	92,03%	80.000.000,00	17.225.000,00	21,53%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		15.000.000,00	13.950.000,00	93,00%	15.000.000,00	0,00	0,00%
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		6.000.000,00	4.450.000,00	74,17%	6.000.000,00	0,00	0,00%
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		6.000.000,00	5100000	0,00%	6.000.000,00	0,00	0,00%
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		6.000.000,00	5.700.000,00	95,00%	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		18.000.000,00	15300000	0,00%	12.000.000,00	0,00	0,00%
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		25.000.000,00	24.700.000,00	98,80%	15.000.000,00	5.000.000,00	33,33%
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		15.000.000,00	14.550.000,00	97,00%	20.000.000,00	6.225.000,00	31,13%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.512.745.870,00	5.280.530.747,00	95,79%	8.897.774.810,00	2.898.623.544,00	32,58%
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan		5.450.750.870,00	5.218.535.747,00	95,74%	8.840.780.010,00	2.863.143.544,00	32,39%
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		36.995.000,00	36.995.000,00	100,00%	31.995.000,00	29.250.000,00	91,42%
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	24.999.800,00	6.230.000,00	24,92%
5.02.01.2.05	Administrasi Kewajiban Perangkat Daerah				60.000.000,00	59.970.000,00	99,95%	30.000.000,00	25.770.000,00	85,90%
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket		60.000.000,00	59.970.000,00	99,95%	30.000.000,00	25.770.000,00	85,90%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.412.465.090,00	1.338.902.215,00	94,79%	919.375.890,00	499.834.164,00	54,37%
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peralatan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peralangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		8.999.000,00	8.997.200,00	99,98%	8.999.000,00	4.498.000,00	49,98%
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket		661.226.190,00	637.456.190,00	96,41%	323.600.390,00	200.548.140,00	61,97%
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		33.090.000,00	32.302.200,00	97,62%	28.090.000,00	18.000.000,00	64,08%
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	3 paket		242.000.000,00	241.255.000,00	99,69%	165.622.500,00	149.360.000,00	90,18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(outcomes/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen		100.149.900,00	95.638.100,00	95,49%	101.064.000,00	40.600.000,00	40,17%
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 paket		42.000.000,00	39.771.840,00	94,69%	42.000.000,00	8.442.960,00	20,10%
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		325.000.000,00	283.481.685,00	87,23%	250.000.000,00	78.385.064,00	31,35%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				806.168.000,00	714.094.397,00	88,58%	786.168.000,00	218.368.828,00	27,78%
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		469.800.000,00	422.467.397,00	89,92%	469.800.000,00	137.248.828,00	29,21%
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		336.368.000,00	291.627.000,00	86,70%	316.368.000,00	81.120.000,00	25,64%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				296.650.000,00	295.112.270,00	99,48%	129.800.000,00	71.169.355,00	54,83%
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		26.650.000,00	25.476.100,00		16.800.000,00	6.700.000,00	39,88%
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%	63.000.000,00	14.500.000,00	23,02%
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 Unit		150.000.000,00	149.636.170,00	99,76%	50.000.000,00	49.969.355,00	99,94%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				480.173.718.989,00	472.334.898.905,00	98,37%	486.137.868.026,00	236.319.533.672,00	48,61%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.417.324.600,00	2.297.057.336,00	95,02%	2.388.447.000,00	271.455.000,00	11,37%
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		201.399.800,00	200.712.300,00	99,66%	205.224.800,00	0,00	0,00%
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		201.399.800,00	200.749.800,00	99,68%	204.959.600,00	0,00	0,00%
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		216.750.000,00	155.000.000,00	71,51%	169.292.500,00	0,00	0,00%
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		139.300.000,00	135.750.000,00	97,45%	168.040.000,00	0,00	0,00%
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		81.050.000,00	81.050.000,00	100,00%	131.840.000,00	122.880.000,00	93,20%
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		115.550.000,00	106.550.000,00	92,21%	105.740.000,00	0,00	0,00%
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		387.350.000,00	371.648.196,00	95,95%	337.350.000,00	67.725.000,00	20,08%
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		678.875.000,00	675.207.040,00	99,46%	562.074.900,00	80.850.000,00	14,38%
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		196.150.000,00	189.340.000,00	96,53%	242.649.900,00	0,00	0,00%
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		199.500.000,00	181.050.000,00	90,75%	261.275.300,00	0,00	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan(outcomes/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD a.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capai Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024		Tingkat Capai Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				724.155.600,00	710.662.400,00	98,14%	710.467.600,00	304.100.500,00	42,80%	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		66.809.000,00	66.809.000,00	100,00%	66.809.000,00	8.112.000,00	12,14%	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		70.250.000,00	69.955.600,00	99,58%	70.249.800,00	31.230.000,00	44,46%	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		217.107.600,00	214.257.300,00	98,69%	253.427.300,00	35.046.500,00	13,83%	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		369.989.000,00	359.640.500,00	97,20%	319.981.500,00	229.712.000,00	71,79%	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				510.194.000,00	477.589.000,00	93,61%	510.179.000,00	52.992.000,00	10,39%	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan		133.454.000,00	127.764.000,00	95,74%	133.454.000,00	8.112.000,00	6,08%	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		125.600.000,00	122.850.000,00	97,81%	127.592.500,00	44.880.000,00	35,17%	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		175.940.000,00	174.475.000,00	99,17%	175.937.500,00	0,00	0,00%	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		16.850.000,00	12.250.000,00	72,70%	16.850.000,00	0,00	0,00%	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		58.350.000,00	40.250.000,00	68,98%	56.345.000,00	0,00	0,00%	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				476.522.044.789,00	468.849.590.169,00	98,39%	482.528.774.426,00	235.690.986.172,00	48,84%	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		452.295.501.140,00	452.239.195.200,00	99,99%	454.693.967.978,00	234.968.739.772,00	51,68%	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		5.172.112.000,00	1.316.816.569,00	25,46%	7.724.550.000,00	722.246.400,00	9,35%	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		19.054.431.649,00	15.293.578.400,00		20.110.256.448,00			
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.452.000.000,00	2.281.029.490,00	93,03%	2.292.000.000,00	273.012.000,00	11,91%	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.452.000.000,00	2.281.029.490,00	93,03%	2.292.000.000,00	273.012.000,00	11,91%	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		45.000.000,00	41.900.000,00	93,11%	45.000.000,00	0,00	0,00%	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		55.770.000,00	51.420.000,00	92,20%	41.000.000,00		0,00%	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan		1.100.000.000,00	1.092.795.700,00	99,35%	900.000.000,00	273.012.000,00	30,33%	

Tabel. T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun 2024	Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indikator Kinerja Utama									
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	
	Indikator Kinerja PD									
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah			BB	BB	BB	A	BB	BB	
2	Capaian SKM Perangkat Daerah			B	B	B	-	B	B	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			100%	100%	100%	54%	100%	100%	
4	Penyampaian LKPD Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Capaian Dana Transfer			100%	100%	100%	46%	100%	100%	
6	Aset yang diamankan secara fisik dan Legal			100%	100%	100%	12%	100%	100%	

Majalengka, 1 Agustus 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Majalengka

Badan Keuangan dan Aset Daerah															
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting				
No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
						KEUANGAN									
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Majalengka		80.000.000,00						80.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Majalengka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Majalengka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00					
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00					
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00					
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00					
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Majalengka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Majalengka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000,00					
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.000.000,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Majalengka			8.897.774.810,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Majalengka			21.136.979.910,00					
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Majalengka	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	8.840.780.010,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Majalengka	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	21.079.985.110,00					
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	31.995.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Majalengka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	31.995.000,00					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Majalengka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.999.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Majalengka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.999.800,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Majalengka			30.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Majalengka			30.000.000,00		
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Majalengka	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	30.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Majalengka	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	30.000.000,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Majalengka			919.375.890,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Majalengka			1.140.375.890,00		
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Majalengka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.999.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Majalengka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.999.000,00		
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Majalengka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	295.226.190,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Majalengka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	418.600.390,00		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Majalengka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	28.090.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Majalengka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	28.090.000,00		
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Majalengka	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	3 paket	194.997.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Majalengka	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	3 paket	285.622.500,00		
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Majalengka	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	100.063.200,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Majalengka	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	101.064.000,00		
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Majalengka	Jumlah Paker Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 paket	42.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Majalengka	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 paket	48.000.000,00		
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Majalengka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Majalengka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Majalengka			786.168.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Majalengka			836.168.000,00		
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Majalengka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	469.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Majalengka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	499.800.000,00		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Majalengka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	316.368.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Majalengka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	336.368.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Majalengka			129.800.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Majalengka			484.800.000,00		
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Majalengka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	16.800.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Majalengka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	16.800.000,00		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Majalengka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	63.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Majalengka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	118.000.000,00	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Majalengka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Majalengka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					2.388.447.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.363.521.900,00	
24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	205.224.800,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Majalengka	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	205.224.800,00	
25	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Majalengka	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	204.959.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Majalengka	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	204.959.600,00	
26	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Majalengka	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	244.792.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Majalengka	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	158.675.000,00	
27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Majalengka	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	168.040.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Majalengka	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	165.300.000,00	
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Majalengka	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	81.040.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Majalengka	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	131.840.000,00	
29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Majalengka	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	81.040.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Majalengka	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	94.175.000,00	
30	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Majalengka	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	337.350.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Majalengka	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	337.349.900,00	
31	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Majalengka	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	562.074.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Majalengka	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	562.074.900,00	
32	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Majalengka	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	242.649.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Majalengka	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	242.647.400,00	
33	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	261.275.300,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	261.275.300,00	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					710.467.600,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Majalengka			710.467.600,00	
34	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	66.809.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	66.809.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	70.249.800,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	70.249.800,00	
36	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	253.427.300,00	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	253.427.300,00	
37	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	319.981.500,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	319.981.500,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											
		Majalengka			510.179.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Majalengka			510.179.000,00	
38	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Majalengka	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	133.454.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Majalengka	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	133.454.000,00	
39	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	127.592.500,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	127.592.500,00	
40	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Majalengka	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	175.937.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Majalengka	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	175.937.500,00	
41	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	16.850.000,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	16.850.000,00	
42	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Majalengka	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	56.345.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Majalengka	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	56.345.000,00	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											
		Majalengka			484.804.224.426,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Majalengka			482.305.534.426,00	
43	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	454.693.967.978,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	454.693.967.978,00	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting	
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	10.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	7.501.310.000,00
45	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.110.256.448,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.110.256.448,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
Pengelolaan Barang Milik Daerah										
46	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	45.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	45.000.000,00
47	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	370.000.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	41.000.000,00
48	Pengamanan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	900.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	900.000.000,00
49	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	175.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	175.000.000,00
50	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	730.000.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	730.000.000,00
51	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	72.000.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Majalengka	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	401.000.000,00
					501.548.436.726,00					
					511.890.026.726,00					

Majalengka, 1 Agustus 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19660311 199203 1 011

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Program				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEUANGAN								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.708.323.800,00				24.419.573.514,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000,00				82.400.000,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	2 Dokumen	15.000.000,00	APBD		2 Dokumen	15.450.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Majalengka	1 Dokumen	6.000.000,00	APBD		1 Dokumen	6.180.000,00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka	1 Dokumen	6.000.000,00	APBD		1 Dokumen	6.180.000,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Majalengka	1 Dokumen	6.000.000,00	APBD		1 Dokumen	6.180.000,00
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	1 Dokumen	12.000.000,00	APBD		1 Dokumen	12.360.000,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	7 Laporan	15.000.000,00	APBD		7 Laporan	15.450.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	2 Laporan	20.000.000,00	APBD		2 Laporan	20.600.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.136.979.910,00				21.771.089.307,30
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka	40 orang/bulan	21.079.985.110,00	APBD		40 orang/bulan	21.712.384.663,30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Program					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Prakiraan Maju	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Majalengka	1 Dokumen	31.995.000,00	APBD		1 Dokumen	32.954.850,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Majalengka	1 Laporan	24.999.800,00	APBD		1 Laporan	25.749.794,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000,00				30.900.000,00	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Majalengka	1 paket	30.000.000,00	APBD		1 paket	30.900.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.140.375.890,00				1.174.587.166,70	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Majalengka	1 paket	8.999.000,00	APBD		1 paket	9.268.970,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Majalengka	7 paket	418.600.390,00	APBD		7 paket	431.158.401,70	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Majalengka	1 paket	28.090.000,00	APBD		1 paket	28.932.700,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Kab. Majalengka	3 paket	285.622.500,00	APBD		3 paket	294.191.175,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Majalengka	2 Dokumen	101.064.000,00	APBD		2 Dokumen	104.095.920,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Majalengka	2 paket	48.000.000,00	APBD		2 paket	49.440.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Majalengka	1 Laporan	250.000.000,00	APBD		1 Laporan	257.500.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				836.168.000,00				861.253.040,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Majalengka	4 Laporan	499.800.000,00	APBD		4 Laporan	514.794.000,00	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Program					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Prakiraan Maju	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Majalengka	4 Laporan	336.368.000,00	APBD		4 Laporan	346.459.040,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				484.800.000,00				499.344.000,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Majalengka	18 Unit	16.800.000,00	APBD		18 Unit	17.304.000,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Majalengka	3 Unit	118.000.000,00	APBD		3 Unit	121.540.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Majalengka	1 Unit	350.000.000,00	APBD		1 Unit	360.500.000,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				485.889.702.926,00				500.466.394.013,78	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.363.521.900,00				2.434.427.557,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Majalengka	2 Dokumen	205.224.800,00	APBD		2 Dokumen	211.381.544,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Majalengka	2 Dokumen	204.959.600,00	APBD		2 Dokumen	211.108.388,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Majalengka	1 Dokumen	158.675.000,00	APBD		1 Dokumen	163.435.250,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Majalengka	1 Dokumen	165.300.000,00	APBD		1 Dokumen	170.259.000,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Majalengka	1 Dokumen	131.840.000,00	APBD		1 Dokumen	135.795.200,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Majalengka	1 Dokumen	94.175.000,00	APBD		1 Dokumen	97.000.250,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Majalengka	2 Dokumen	337.349.900,00	APBD		2 Dokumen	347.470.397,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Program					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Majalengka	2 Dokumen	562.074.900,00	APBD		2 Dokumen	578.937.147,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Majalengka	2 Dokumen	242.647.400,00	APBD		2 Dokumen	249.926.822,00
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Majalengka	1 Dokumen	261.275.300,00	APBD		1 Dokumen	269.113.559,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				710.467.600,00				731.781.628,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Majalengka	1 Dokumen	66.809.000,00	APBD		1 Dokumen	68.813.270,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Majalengka	1 Dokumen	70.249.800,00	APBD		1 Dokumen	72.357.294,00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Majalengka	1 Dokumen	253.427.300,00	APBD		1 Dokumen	261.030.119,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Majalengka	1 Dokumen	319.981.500,00	APBD		1 Dokumen	329.580.945,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				510.179.000,00				525.484.370,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Majalengka	3 Laporan	133.454.000,00	APBD		3 Laporan	137.457.620,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Program					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Prakiraan Maju	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Majalengka	1 Laporan	127.592.500,00	APBD		1 Laporan	131.420.275,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Majalengka	4 Dokumen	175.937.500,00	APBD		4 Dokumen	181.215.625,00	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Majalengka	1 Dokumen	16.850.000,00	APBD		1 Dokumen	17.355.500,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Majalengka	1 Dokumen	56.345.000,00	APBD		1 Dokumen	58.035.350,00	
5.02.02.2.04	Pennunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				482.305.534.426,00				496.774.700.458,78	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Majalengka	1 Laporan	454.693.967.978,00	APBD		1 Laporan	468.334.787.017,34	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Majalengka	1 Laporan	7.501.310.000,00	APBD		1 Laporan	7.726.349.300,00	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Majalengka	1 Laporan	20.110.256.448,00	APBD		1 Laporan	20.713.564.141,44	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.292.000.000,00				2.360.760.000,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.292.000.000,00				2.360.760.000,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Majalengka	2 Dokumen	45.000.000,00	APBD		2 Dokumen	46.350.000,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Majalengka	1 Laporan	41.000.000,00	APBD		1 Laporan	42.230.000,00	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Program				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Majalengka	3 Laporan	900.000.000,00	APBD		3 Laporan	927.000.000,00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Majalengka	1 Laporan	175.000.000,00	APBD		1 Laporan	180.250.000,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Majalengka	1 Dokumen	730.000.000,00	APBD		1 Dokumen	751.900.000,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Majalengka	4 Laporan	401.000.000,00	APBD		4 Laporan	413.030.000,00
Jumlah Total					511.890.026.726,00				527.246.727.527,78

Majalengka, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA


Dr. H. ALAN SOEHERMAN S.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MAJALENGKA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN (SAB KEGIATAN)	TARJET PERIODE RENCANA KORPORASI	REALISASI TANGGAPAN TAHUN 2022	PRASARAN TARGET RENCANA KORPORASI	CAPAIAN KEMERIA DAN KETANGKALAN PERUBAHAN					KELOMPOK SASARAN	PRASARAN KAJI RENCANA TAHUN 2023								
							SEBELUM	JEREBDAH	P4SD (INDUKATIF Rn)				Bertambah/Berkurang (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJET	PAU (INDUKATIF Rn)	PRASARAN KAJI RENCANA TAHUN 2024	
									TARGET 2024	RUPD 2024	APBD 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3		BADAN KEJANGKARAN DAN ASSET DAERAH																			
		URUSAN PERUBAHAN / BIDANG PERUBAHAN																			
5.02		KEJANGKARAN	Transparansi dan Akuntabilitas																		
5.02.01		PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Transparansi dan Akuntabilitas																		
5.02.01.2.01		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Transparansi dan Akuntabilitas																		
5.02.01.2.01.001		Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen																
5.02.01.2.01.002		Kendali dan Pengawasan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen																
5.02.01.2.01.003		Kendali dan Pengawasan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen																
5.02.01.2.01.004		Kendali dan Pengawasan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen																
5.02.01.2.01.005		Kendali dan Pengawasan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen																
5.02.01.2.01.006		Kendali dan Pengawasan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen																
5.02.01.2.01.007		Kendali dan Pengawasan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen																
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Transparansi dan Akuntabilitas																		
5.02.01.2.02.001		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen																



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya Jenderal Achmad Yani Nomor 9 Majalengka 45411
Telp./Faksimilie (0233) 281167 Email : bkad.majalengka.21@gmail.com
Website : bkad.majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.7.2.6/ 6 /Skr

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 125 adalah tahap persiapan, dimana salah satu diantaranya adalah membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 70);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 82 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 82);
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 30);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 1 Agustus 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka,



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 000.7.2.6/ 6 /Skr
TANGGAL : 1 Agustus 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
2.	Ketua	:	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
3.	Sekretaris	:	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
4.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
			2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
			3. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
			4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
			5. Analis Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
			6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
			7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Dana Transfer pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
			8. Kepala Sub Bidang Belanja pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
			9. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
		10. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
		11. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
		12. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
		13. Analis Kebijakan pada Bidang Aset Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**
NOMOR : 000.7.2.6/ 6 /Skr
TANGGAL : 1 Agustus 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya Jenderal Achmad Yani Nomor 9 Majalengka 45411
Telp/Faksimilie (0233) 281167 Email : bkad.majalengka.21@gmail.com
Website : bkad.majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.7.2.6/ 7 /Skr

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa sebagai turunan dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 70).

26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dokumen perencanaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024;

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024;

KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : \ Agustus 2024
Kepala Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Majalengka



Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

